

Skripsi Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
Semester Genap 2018/2019

**KAJIAN PROSEDUR ANTARA SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION*
DENGAN SISTEM BAPETEN *LICENSING AND INSPECTION SYSTEM*
DALAM PELAKSANAAN PERIZINAN PEMANFAATAN TENAGA
NUKLIR PENGGUNAAN DALAM RADIOGRAFI INDUSTRI
FASILITAS TERBUKA DI KOTA BATAM**

NPM: 1551132
Desca Trivani

Abstrak

Saat ini, semakin banyak diperlukan jasa pemeriksaan terhadap struktur ataupun kualitas bahan, seperti mutu sambungan las maupun kualitas logam cor tanpa merusak bahan, yaitu yang dikenal sebagai kegiatan uji tak merusak. Radiografi industri yang merupakan salah satu metode uji tak merusak, memerlukan izin dari BAPETEN melalui sistem *Balis*, namun pasca sistem *OSS* diluncurkan, pengajuan izin kegiatan usaha tersebut juga perlu dilakukan melalui sistem *OSS* yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang merupakan upaya dari Pemerintah Indonesia untuk memangkas birokrasi yang dinilai berbelit-belit, sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala dalam pengajuan izin yang dapat menghambat kegiatan usaha. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan dapat menjelaskan proses dan hambatan yang dihadapi oleh para pelaku usaha dalam pelaksanaan perizinan pemanfaatan tenaga nuklir penggunaan dalam radiografi industri fasilitas terbuka di Kota Batam pasca diluncurkannya sistem *OSS*.

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum dengan unsur empiris sebagai sumber utamanya. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber dan responden sebagai data utama, kemudian data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai data pendukung.

Hasil dari penelitian ini, Peneliti menemukan bahwa sistem yang baru diluncurkan tersebut dinilai masih kurang optimal untuk digunakan karena masih terus dikembangkan yang menimbulkan kebingungan terutama bagi pelaku usaha. Adapun, untuk Kota Batam, sebenarnya memerlukan peraturan khusus untuk menerapkan sistem *OSS* karena Kota Batam merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang berbeda dari daerah lain di Indonesia.

Kata Kunci: prosedur perizinan, sistem *OSS*, sistem *Balis*, radiografi industri